

SUARA-SUARA GENERASI MUDA UNTUK BANGSA

KOMUNIKASI KOMUNITAS MUDA TENTANG EKONOMI INDONESIA



SUARA-SUARA GENERASI MUDA UNTUK BANGSA

KOMUNIKASI KOMUNITAS MUDA TENTANG EKONOMI INDONESIA

PENGANTAR KOMUNIKASI

SUARA DARI RUANG GAGASAN

Youth Economic Summit 2023 yang diselenggarakan **CORE Indonesia** bersama **Suara.com** menghasilkan berbagai inisiatif terkait kepentingan generasi muda Indonesia dalam perekonomian nasional. Salah satu inisiatif itu adalah terbentuknya **Ruang Gagasan** yang mendiskusikan problem krusial terkini di bidang ekonomi dari sudut pandang kaum muda. Diawali dari sejumlah komunitas ekonomi hijau dan inklusif digital, forum ini terbuka bagi kalangan muda mana saja yang peduli pada pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan. Ruang Gagasan bukan wahana "gas-gasan" aspirasi, melainkan tempat merentangkan gugusan pemikiran solusi untuk bangsa. Kaum muda layak turut menentukan pembangunan, bukan sekadar terdampak kebijakan.

PENGANTAR

Indonesia memiliki potensi besar dalam pembangunan ekonomi melalui kontribusi generasi muda, dengan 66,9 juta penduduk berusia 15–29 tahun atau sekitar 24,04% dari total populasi (BPS, 2024). Bonus Demografi yang diproyeksikan berlangsung pada periode 2020–2035, dimana proporsi usia produktif akan mencapai 64% dari total populasi, memberikan peluang strategis bagi percepatan pembangunan ekonomi. Dengan lebih dari 191 juta orang berada dalam usia produktif, mayoritas berasal dari Generasi Z, Indonesia memerlukan peningkatan keterampilan dan pendidikan, terutama dalam menghadapi kebutuhan akan 9 juta talenta digital menjelang 2030 .

Namun, Indonesia masih menghadapi tantangan seperti stagnasi ekonomi, rendahnya penciptaan lapangan kerja, minimnya wirausaha muda, dan ancaman perubahan iklim. Menurut data BPS, pada 2023 terdapat 9,89 juta (22,25%) pemuda usia 15–24 tahun yang masuk kategori NEET (Not in Employment, Education, or Training). Meski turun dibanding masa pandemi, persentase ini masih lebih tinggi dari rata-rata dunia, yakni 21,6%.

Di samping itu, pertumbuhan digitalisasi juga harus sejalan dengan pengembangan ekonomi hijau, mengingat keberlanjutan lingkungan kini telah menjadi bagian penting dalam bisnis global. Youth Economic Summit 2024, yang diselenggarakan oleh CORE Indonesia dan Suara.com, bertujuan untuk mendorong generasi muda menjadi aktor utama dalam mendukung ekonomi digital yang inklusif dan ekonomi hijau yang berkelanjutan. Dengan tema pembangunan berkelanjutan berbasis teknologi digital, Youth Economic Summit akan menjadi platform untuk menyatukan inovasi pemuda dalam mengatasi tantangan ekonomi nasional.hingga

Sebagai bagian dari rangkaian acara Youth Economic Summit, Ruang Gagasan mengumpulkan pandangan dari kalangan muda tentang berbagai isu strategis. Mulai dari pengurangan emisi, pemberdayaan UKM, pertanian yang cerdas, pendidikan, hingga kontribusi anak muda dalam kemerdekaan Indonesia. Dari diskusi ini muncul tawaran-tawaran solusi atas problem-problem yang telah dirumuskan. Lebih jelasnya, dapat dilihat dari isi pembahasan dalam buku tipis ini.

Tentu tidak semua isu sempat didiskusikan. Masih banyak isu-isu lain yang memerlukan perhatian serius, dan sayangnya sebagian besar orang muda mengabaikannya. Namun, setidaknya terdapat 9 isu utama yang telah dibahas bersama. Kesembilan itu tersebut dipilih berdasarkan urgensi dan relevansinya bagi anak muda. Isu-isu itu juga sempat ramai di publik dan berkenaan langsung dengan hajat hidup kalangan muda. Bila tak disuarakan sejak sekarang, ke depan bakal makin problematik dan memberatkan generasi berikutnya.

Tentu tidak semua isu sempat didiskusikan. Masih banyak isu-isu lain yang memerlukan perhatian serius, dan sayangnya sebagian besar orang muda mengabaikannya. Namun, setidaknya terdapat 9 isu utama yang telah dibahas bersama. Kesembilan itu tersebut dipilih berdasarkan urgensi dan relevansinya bagi anak muda. Isu-isu itu juga sempat ramai di publik dan berkenaan langsung dengan hajat hidup kalangan muda. Bila tak disuarakan sejak sekarang, ke depan bakal makin problematik dan memberatkan generasi berikutnya.

Tentu pula suara-suara dari Ruang Gagasan tidak mewakili keseluruhan anak muda se-Tanah Air. Namun, rangkuman pemikiran dalam buku kecil ini setidaknya merefleksikan bagaimana generasi muda sekarang memotret persoalan dengan sudut pandang sendiri, yang mungkin berbeda dari generasi-generasi sebelumnya. Setidaknya pula menepis tuduhan bahwa anak muda masa kini masing-masing sibuk dengan dirinya sendiri, tak peduli pada permasalahan bersama.

Hasil diskusi dikemas dalam dua bentuk. Pertama, rekomendasi dalam bentuk Komunike yang disampaikan pada kegiatan puncak Youth Economic Summit 2024. Kedua, dokumen ringkasan diskusi yang dikemas dalam bentuk buku digital yang dapat diunduh secara gratis. Harapannya, suara-suara dari Ruang Gagasan ini tidak hanya berhenti di telinga publik, tetapi juga sampai ke lubuk hati para pengampu kebijakan dan pemangku kepentingan.

Atas partisipasi seluruh pihak, kami mengucapkan terima kasih.

Jakarta, 23 November 2024

Ruang Gagasan

RUANG GAGASAN

Ruang Gagasan merupakan sebuah forum strategis yang menghimpun berbagai pemikiran dan gagasan dari beragam elemen anak muda. Forum yang digelar secara rutin setiap Kamis sore di kantor CORE Indonesia, Tebet, Jakarta Selatan, ini menghimpun pandangan kaum muda baik yang tergabung dalam komunitas tertentu maupun perseorangan dari berbagai latar belakang. Se jauh ini komunitas muda yang terlibat berasal dari kalangan BUMN, birokrat, akademisi, pengusaha, dan profesional.

Sepanjang Februari hingga Oktober 2024, forum ini telah diselenggarakan sebanyak 9 kali pertemuan dengan mengangkat berbagai isu strategis yang mencakup ekonomi, pendidikan, lingkungan, dan ketenagakerjaan. Pertemuan berlangsung secara interaktif melalui penggabungan metode diskusi, lokakarya, dan permainan. Sesekali diskusi dilakukan secara formal, namun keakraban antarpeserta diutamakan dalam setiap pertemuan. Di sini, kami ingin membangun kolaborasi bukan kompetisi. Hasil dari setiap diskusi tidak hanya berhenti menjadi wacana, melainkan dirumuskan ke dalam dokumen rekomendasi yang dapat dimanfaatkan oleh para pihak terkait di berbagai sektor.

PERKENALAN

KOMUNITAS MUDA YANG BERSUARA

Komunitas muda yang bersuara di sini tidak bersifat elitis dan dijamin non-politis. Personal dan komunitas bergabung demi membahas hal-hal strategis yang mungkin bikin miris tapi sejatinya strategis. Sebab itu, suara-suara yang muncul dari ruang ini tidak semata kritis, tapi juga memiliki landasan teoritis dan sebagian besar berasal dari pengalaman praktis. Berbagai perspektif ditampung dalam diskusi interaktif untuk kemudian dikemas sebagai pemikiran kolaboratif. Siapa pun boleh bergabung dan turut bersuara, asalkan muda dan berpikiran inklusif.

KOMUNITAS MUDA

Ruang Gagasan telah diikuti oleh hampir 500 anak muda yang berasal dari berbagai latar belakang yang memperkaya sudut pandang pembahasan. BUMN Muda hadir dengan pengalaman praktis mereka dalam pengelolaan berbagai sektor strategis negara. Sementara ASN Muda membawa perspektif dari sisi birokrasi dan implementasi kebijakan publik. Keterlibatan akademisi memberikan landasan teoretis dan hasil riset terkini yang memperkuat basis argumentasi. Pengusaha muda turut menyumbangkan pandangan dari sisi praktik bisnis dan dinamika pasar. Keberagaman latar belakang ini menciptakan diskusi yang komprehensif dan menghasilkan rekomendasi yang mempertimbangkan berbagai aspek dan kepentingan

PEMBAHASAN **PERSOALAN EKONOMI GENERASI MUDA**

Generasi muda Indonesia menghadapi tantangan serius. Diharapkan jadi generasi emas, tapi data menunjukkan situasi cemas: hampir 10 juta pemuda menganggur dan tidak terdidik. Situasi kalangan muda makin terjepit ekonomi yang stagnan, yang berdampak sempitnya lapangan kerja baru dan minimnya wirausaha muda. Di sisi lain, ada kesenjangan besar antara kebutuhan dan ketersediaan talenta digital menjelang 2030. Jangan sampai bonus demografi berubah menjadi bencana demografi, tapi bagaimana caranya?

1. SIAPA BERANI MENURUNKAN EMISI

Perubahan iklim telah menjadi tantangan global yang semakin mendesak dengan temperatur bumi yang terus menunjukkan tren kenaikan yang mengkhawatirkan. Perjanjian Paris yang disepakati tahun 2015 telah menetapkan target untuk membatasi kenaikan suhu global di bawah 2°C dari masa pra-industri, dengan upaya lebih lanjut untuk membatasi kenaikan hingga 1,5°C. Namun data terbaru menunjukkan bahwa pada tahun 2023, suhu bumi telah mencapai 1,48°C dari masa pra-industri, mendekati batas kritis (World Meteorological Organization/WMO Report, 2024). Kondisi tersebut semakin mengkhawatirkan lantaran target penurunan emisi gas rumah kaca menunjukkan hasil yang memprihatinkan.

Dengan target penurunan emisi sebesar 912 juta ton pada tahun 2030, Indonesia baru berhasil menurunkan emisi sekitar 91,5 juta ton, atau hanya 10% dari target. Hal ini mencerminkan bahwa upaya yang dilakukan masih jauh dari harapan dan tidak cukup untuk memenuhi komitmen yang ditetapkan dalam Perjanjian Paris 2015, Peningkatan suhu bumi membawa dampak serius, termasuk perubahan iklim, mencairnya es di kutub, kehilangan keanekaragaman



hayati, dan penurunan kesehatan manusia. Di tingkat global, sektor energi masih menjadi kontributor utama emisi gas rumah kaca dengan menyumbang sekitar 73,2% dari total emisi global, transportasi 16,2%, manufaktur dan konstruksi 12,4%, dan sektor energi lainnya 3,2% (International Energy Agency/IEA Report, 2023). Sementara di Indonesia, Berdasarkan data Kementerian LHK, 44% emisi di Indonesia berasal dari sektor energi, 33,8% berasal dari perubahan lahan kehutanan, 10,4% dari pertanian, 9% berasal dari sampah.

Pemanasan global dapat berdampak besar pada ekonomi, termasuk potensi penurunan PDB hingga 10% pada 2025 (Kementerian Keuangan, 2023). Dampak ini berisiko menghambat pengentasan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja bagi generasi muda.



Oleh karena itu, penurunan emisi gas rumah kaca menjadi langkah penting yang harus diambil untuk mencegah bencana lingkungan yang lebih besar.

Namun, banyak tantangan yang menghambat proses penurunan emisi. Ketergantungan Indonesia pada sumber daya fosil masih sangat tinggi. Hal ini berkaitan dengan potensi dampak sosial-ekonomi pada masyarakat yang bergantung pada sektor-sektor tersebut, termasuk potensi hilangnya lapangan kerja di industri konvensional. Berdasarkan analisis International Labour Organization (ILO, 2023), diperkirakan lebih dari 2,5 juta pekerja di Indonesia akan membutuhkan program peningkatan keterampilan dan pemberdayaan ekonomi dalam proses transisi ini.

Fokus yang berbeda antar negara terhadap prioritas perubahan iklim juga memperburuk situasi. Beberapa negara lebih memprioritaskan pertumbuhan ekonomi daripada penurunan emisi, mengakibatkan kurangnya kerja sama internasional yang solid dan terkoordinasi dalam mengatasi masalah ini. Di samping itu, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap dampak pilihan energi yang mereka ambil menjadi kendala yang signifikan. Tanpa edukasi yang memadai mengenai pentingnya energi hijau, peralihan ke pilihan yang lebih berkelanjutan akan berlangsung lambat.

Isu perubahan iklim ini tidak hanya menjadi tantangan global, tetapi juga secara langsung memengaruhi masa depan anak muda yang akan mewarisi bumi di masa mendatang. Perlunya kesadaran yang tinggi dari para generasi muda bahwa dampak negatif perubahan iklim akan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari mereka jika tidak ditanggulangi sejak dini. Karena itu, pemuda kini memainkan peran penting dalam mendesak adanya kebijakan yang lebih berani untuk mengurangi emisi karbon dan mengadopsi teknologi yang ramah lingkungan.



KENDALA PENDANAAN DAN REGULASI

Negara-negara menghadapi kesulitan dalam mencapai target penurunan emisi karena kendala pada aspek pendanaan, di mana kebutuhan investasi untuk transisi menuju ekonomi rendah karbon diperkirakan mencapai USD 479 miliar hingga tahun 2030 (Climate Policy Initiative Report, 2023). Kesenjangan pendanaan ini diperparah oleh masih terbatasnya akses ke pembiayaan hijau dan rendahnya insentif untuk investasi ramah lingkungan di berbagai sektor.

Tantangan berikutnya berkaitan dengan infrastruktur dan teknologi, terutama di sektor energi. Indonesia masih menghadapi kendala dalam pengembangan infrastruktur energi terbarukan, termasuk jaringan transmisi yang belum memadai dan keterbatasan teknologi penyimpanan energi (International Renewable Energy Agency/IRENA, 2023).

Di sektor kehutanan dan lahan, tantangan utama mencakup kesulitan dalam pemantauan dan penegakan hukum terkait alih fungsi lahan (World Resources Institute, 2023).

Situasi ini diperparah dengan adanya regulasi yang menghambat pengembangan PLTS Atap, seperti Peraturan Menteri ESDM No. 26 Tahun 2021 yang mengatur skema ekspor impor listrik dengan rasio 1:0,6, dimana pelanggan hanya mendapatkan kompensasi 60% dari kelebihan listrik yang diekspor ke jaringan PLN. Regulasi ini dinilai kurang menarik bagi investasi PLTS Atap dan menghambat pemanfaatan energi surya yang berlimpah di Indonesia (IESR, 2023).

Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan sinergi antar regulasi yang kuat. Regulasi tidak hanya harus diciptakan, tetapi juga harus ditaati dan ditegakkan. Pemerintah perlu berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk menyusun kebijakan yang lebih inklusif, melibatkan semua pemangku kepentingan agar regulasi yang dibuat dapat diimplementasikan dengan baik.

TATA KELOLA DAN KOLABORASI

Pentingnya tata kelola pemerintahan dan paradigma pengusaha harus menjadi perhatian utama. Banyak pengusaha yang masih berfokus pada keuntungan maksimal tanpa mempertimbangkan dampak lingkungan. Pengusaha yang lebih pro-lingkungan diharapkan dapat menjadi motor penggerak dalam mendukung energi berkelanjutan. Selain itu, masyarakat dapat berperan aktif melalui berbagai inisiatif sederhana seperti penggunaan transportasi umum secara masif, gerakan hemat energi listrik komunal. Di bidang pengelolaan sampah, pembentukan bank sampah juga terbukti efektif mengurangi emisi Gas Rumah Kaca.

Peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya mengurangi emisi sangat krusial. Komitmen pemerintah dalam mengalokasikan anggaran untuk penurunan emisi juga menjadi sangat penting. Insentif atau pengurangan pajak bagi pelaku usaha yang bergerak di sektor hijau dapat menjadi langkah yang efektif untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penurunan emisi..



REKOMENDASI

- **Sinergi Regulasi** : Pemerintah perlu melakukan sinergi an melibatkan stakeholder dalam proses pembuatan regulasi atau kebijakan. Salah satu bentuk konkritnya adalah kebijakan pemanfaatan energi surya atau PLTS Atap sebagai sumber energi ramah lingkungan sebagai langkah mengurangi emisi dari sektor energi. Pemerintah juga perlu memberikan dukungan insentif untuk mendorong sektor swasta dapat turut berpartisipasi
- **Edukasi Masyarakat** : Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak penggunaan energi fosil dan manfaat energi terbarukan harus menjadi prioritas. Kampanye edukasi hemat energi, penggunaan transportasi umum dan promosi produk hijau perlu dilakukan secara masif.
- **Dukungan untuk Pendanaan di sektor hijau** : Pemerintah perlu meningkatkan dukungan dan inovasi pendanaan dengan berbagai alternatif seperti penerbitan instrumen hijau seperti Green Bonds & Green Sukuk. Selain itu perlunya dukungan APBN untuk program dan proyek rendah karbon untuk meng insentif sektor swasta terlibat dalam proyek hijau
- **Kolaborasi Lintas Sektor** : Mendorong kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan lembaga penelitian untuk mengembangkan teknologi ramah lingkungan dan meningkatkan kapasitas produksi EBT.

KESIMPULAN

Penurunan emisi gas rumah kaca di Indonesia masih jauh dari target yang ditetapkan. Dengan berbagai tantangan yang ada, mulai dari ketergantungan pada sumber daya fosil hingga rendahnya kesadaran masyarakat, langkah-langkah yang lebih komprehensif dan terkoordinasi diperlukan. Sinergi antara regulasi yang kuat, peningkatan kesadaran masyarakat, serta dukungan terhadap teknologi energi terbarukan menjadi kunci dalam upaya mencapai target penurunan emisi yang telah ditetapkan. Tanpa tindakan yang konkret dan kolaborasi yang solid, Indonesia akan kesulitan untuk memenuhi komitmennya dalam mengatasi perubahan iklim dan menjaga kelestarian lingkungan.



2. BIAYA KULIAH KELAS MENENGAH

Selama beberapa dekade terakhir, arah kebijakan sosial di Indonesia masih didominasi oleh program-program yang menargetkan masyarakat prasejahtera dan kelompok yang hidup dalam kemiskinan ekstrem. Meskipun fokus tersebut memang tepat dan diperlukan mengingat urgensi penanganan kemiskinan, namun hal ini menciptakan kesenjangan dalam perlindungan sosial bagi kelompok masyarakat lainnya. Secara khusus, segmen kelas menengah yang jumlahnya kini bahkan mengalami penurunan. Kelas menengah belum mendapatkan perhatian yang memadai dalam bentuk kebijakan dan regulasi yang spesifik.

Kesenjangan kebijakan ini terlihat nyata dalam sektor pendidikan tinggi. Meski ada kebijakan mandatory spending untuk sektor pendidikan sebesar 20 persen dari total Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), namun yang dialokasikan untuk perguruan tinggi hanya 0,6 persen dari APBN. Alokasi tersebut jauh di bawah rekomendasi UNESCO yang minimal 2 persen dari APBN. Kecilnya anggaran pemerintah untuk pendidikan tinggi mendorong setiap kampus harus mencari pendanaan lain, salah satunya lewat UKT (Uang Kuliah Tunggal)..

Pemberlakuan UKT ini bermula dari perubahan kebijakan menjadikan status perguruan tinggi negeri berbadan hukum (PTN-BH). Kebijakan PTN-BH memberikan kewenangan kepada setiap perguruan tinggi negeri untuk mengelola sumber dayanya, termasuk penentuan biaya pendidikan. Besaran UKT setiap kampus negeri berbeda-beda, tergantung biaya operasional dan diversifikasi sumber pendapatannya.

Kelas menengah, yang sebenarnya berperan vital sebagai penggerak ekonomi, kini menghadapi dilema ganda. Di satu sisi, mereka memiliki kerentanan tersendiri terhadap guncangan sosial-ekonomi, namun di sisi lain sering kali kesulitan mengakses bantuan pendidikan atau beasiswa karena dianggap "terlalu mampu" untuk kriteria pemerintah. Minimnya kerangka regulasi yang melindungi kelas menengah ini tidak hanya menghambat mobilitas sosial tetapi juga menyebabkan stagnasi peningkatan kualitas SDM Indonesia. Proporsi penduduk 15 tahun ke atas yang mengenyam pendidikan tinggi pada tahun 2023 saja masih di kisaran 10,15 persen.

Situasi ini semakin diperparah dengan munculnya fenomena pinjaman online sebagai alternatif pembiayaan pendidikan. Meskipun menjadi pilihan praktis, tingginya bunga pinjaman justru berpotensi menciptakan beban finansial jangka panjang bagi mahasiswa.

andingkan dengan negara-negara seperti Amerika Serikat, Australia, India, dan Malaysia yang telah mengembangkan skema pinjaman pendidikan yang lebih fleksibel dan inklusif.

PEMBIAYAAN PENDIDIKAN YANG TERJANGKAU

Salah satu isu sentral dalam pembahasan ini adalah tingginya Uang Kuliah Tunggal (UKT) di PTN BH. Meningkatnya biaya ini disebabkan oleh hilangnya subsidi penuh dari pemerintah, yang berakibat pada beban biaya pendidikan yang sepenuhnya ditanggung mahasiswa. Oleh karena itu, perluasan subsidi pendidikan menjadi solusi penting untuk meringankan beban mahasiswa.

Pengembangan skema pembayaran kuliah yang lebih fleksibel juga harus dipertimbangkan. Jika perbankan terlibat dalam pembiayaan pendidikan, maka bank dapat menawarkan pinjaman dengan aturan yang jelas dan transparan. Namun, penyaluran kredit oleh bank harus dilakukan dengan hati-hati agar kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan tetap terjaga.

REKOMENDASI UNTUK ALTERNATIF SKEMA PEMBAYARAN

- **Perluasan Cakupan Subsidi Pendidikan:** Pemerintah perlu memperluas cakupan subsidi pendidikan sehingga dapat menjangkau mahasiswa dari semua lapisan ekonomi. Ini mencakup skema pencicilan yang lebih fleksibel dan keringanan biaya bagi mahasiswa yang benar-benar membutuhkan.
- **Edukasi Masyarakat :** Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak penggunaan energi fosil dan manfaat energi terbarukan harus menjadi prioritas. Kampanye edukasi hemat energi, penggunaan transportasi umum dan promosi produk hijau perlu dilakukan secara masif.
- **Dukungan untuk Pendanaan di sektor hijau :** Pemerintah perlu meningkatkan dukungan dan inovasi pendanaan dengan berbagai alternatif seperti penerbitan instrumen hijau seperti Green Bonds & Green Sukuk. Selain itu perlunya dukungan APBN untuk program dan proyek rendah karbon untuk meng insentif sektor swasta terlibat dalam proyek hijau

KESIMPULAN

Permasalahan biaya pendidikan tinggi di Indonesia adalah isu yang kompleks, dihadapkan pada keterbatasan dukungan pemerintah, tingginya biaya kuliah, dan preferensi investor. Meskipun ada program bantuan, masih banyak mahasiswa yang terjebak dalam kesulitan finansial. Untuk mengatasi tantangan ini, perlu langkah-langkah konkret, termasuk perluasan subsidi pendidikan, program edukasi bagi masyarakat, dan kolaborasi dengan perbankan untuk menyediakan produk keuangan yang mendukung. Dengan pendekatan yang tepat, diharapkan pendidikan tinggi di Indonesia dapat menjadi lebih terjangkau dan aksesibel bagi semua lapisan masyarakat.



3. UMKM MUDA BERANI EKSPOR

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memainkan peran vital dalam perekonomian Indonesia. Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UKM, di tahun 2022, UMKM menyumbang lebih dari 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia dan menyerap sekitar 97% dari total tenaga kerja. Di tengah dinamika ekonomi global dan persaingan yang semakin ketat, UMKM Indonesia, terutama yang dikelola oleh generasi muda, memiliki potensi besar untuk tumbuh dan berkembang melalui ekspansi ke pasar internasional.

Berdasarkan laporan dari Badan Pusat Statistik (BPS), nilai ekspor produk UMKM Indonesia masih tergolong rendah dibandingkan dengan negara tetangga seperti Malaysia dan Thailand, yakni hanya berkontribusi 15% terhadap ekspor nasional. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak potensi yang belum digali dan dikembangkan oleh UKM Indonesia, khususnya yang dikelola oleh anak muda. Misalnya, produk-produk kerajinan tangan, fashion, dan makanan olahan memiliki daya tarik yang besar di pasar internasional, namun masih memerlukan peningkatan dari segi kualitas dan pemasaran.

Generasi muda dikenal dengan kreativitas dan inovasi yang tinggi. Mereka cenderung lebih terbuka terhadap teknologi baru dan perubahan pasar yang dinamis. Di era digital ini, akses terhadap informasi dan pasar global menjadi lebih mudah, memberikan kesempatan emas bagi UKM muda untuk menjangkau konsumen di luar negeri. Ekspansi ke pasar ekspor bukan hanya memperluas jangkauan pasar, tetapi juga dapat meningkatkan daya saing, kualitas produk, dan kepercayaan diri pelaku usaha muda dalam menghadapi persaingan global.



TANTANGAN YANG DIHADAPI UKM DALAM EKSPOR

Meskipun demikian, langkah untuk memasuki pasar ekspor tidaklah mudah. Banyak tantangan yang harus dihadapi, mulai dari pemahaman tentang regulasi ekspor, kemampuan bersaing dengan produk luar negeri, hingga mengatasi kendala logistik dan pengiriman. Salah satu kendala yang sering dihadapi oleh UKM dalam proses ekspor adalah biaya logistik yang tinggi. Biaya produksi mungkin lebih murah, tetapi tingginya biaya logistik membuat produk Indonesia tidak kompetitif di pasar internasional. Oleh karena itu, perhatian pemerintah terhadap infrastruktur dan sistem logistik sangat penting untuk menurunkan biaya tersebut.

Lebih jauh sebelum terjun ke pasar ekspor, pelaku UKM perlu meningkatkan kualitas produk dan layanan yang mereka tawarkan. Langkah ini bisa dilakukan melalui pelatihan, sertifikasi, dan standarisasi produk agar memenuhi standar internasional. Pemasaran yang kuat juga menjadi kunci sukses bagi UKM dalam memasuki pasar global. UKM perlu aktif mengikuti pameran dagang internasional dan melakukan promosi secara online. Selain itu, membangun jaringan dengan pembeli potensial di luar negeri menjadi langkah strategis untuk memperluas jangkauan pasar.

Penting bagi UKM untuk memahami regulasi perdagangan internasional untuk menghindari kendala yang dapat menghambat proses ekspor. Pelatihan dan seminar mengenai ekspor-impor, serta konsultasi dengan lembaga terkait seperti Kementerian Perdagangan, sangat diperlukan untuk memperoleh informasi terkini mengenai regulasi yang berlaku. Kerja sama dengan pihak lain juga penting; UKM dapat bergabung dengan asosiasi, mengikuti program business matching, dan menjalin kerjasama dengan perusahaan multinasional untuk membuka akses pasar yang lebih luas.



Inovasi berkelanjutan juga sangat penting bagi UKM untuk menjaga daya saing mereka di pasar internasional. Mereka perlu mengembangkan produk baru, mengikuti tren pasar, dan memanfaatkan teknologi terbaru dalam proses produksi dan pemasaran. Oleh karena itu, penting bagi UKM muda untuk dibekali dengan pengetahuan yang memadai mengenai potensi pasar ekspor dan strategi yang tepat untuk menghadapinya. Upaya kolaboratif antara pemerintah, pelaku usaha, dan akademisi juga diperlukan untuk memberikan bimbingan dan dukungan yang dibutuhkan.

Untuk meningkatkan kapasitas calon eksportir, pemerintah dan lembaga terkait perlu aktif mendorong partisipasi mereka dalam program Kelas Ekspor. Pendampingan menyeluruh sangat diperlukan, mulai dari memberikan informasi pasar hingga mengelola dokumen ekspor yang kompleks. Komunikasi yang baik dengan Kementerian Luar Negeri juga penting untuk mengakses informasi pasar dan regulasi negara tujuan.

REKOMENDASI

- **Pelatihan dan Edukasi** : Meningkatkan pelatihan dan seminar tentang ekspor-impor untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada UKM mengenai regulasi dan proses ekspor.
- **Pengembangan Infrastruktur** : Fokus pada peningkatan infrastruktur dan sistem logistik untuk menurunkan biaya ekspor, sehingga produk Indonesia lebih kompetitif di pasar global.
- **Jaringan dan Kerja Sama** : Jaringan dan Kerja Sama : Mendorong UKM untuk bergabung dengan asosiasi dan menjalin kerja sama dengan perusahaan multinasional dan diaspora untuk membuka akses pasar yang lebih luas.
- **Pendampingan dan Konsultasi** : Memberikan pendampingan menyeluruh kepada calon eksportir, termasuk pengelolaan dokumen dan strategi pemasaran yang efektif.
- **Roadmap Ekspor** : Menyusun roadmap ekspor yang komprehensif untuk memberikan panduan strategis kepada pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan ekspor.



KESIMPULAN

UMKM Indonesia memiliki peran penting dalam ekonomi nasional dengan kontribusi besar terhadap PDB dan penyerapan tenaga kerja. Meski potensial untuk ekspansi ke pasar global, kontribusi ekspor UMKM masih rendah dibandingkan negara tetangga, dengan tantangan utama pada kualitas produk, biaya logistik, dan pemahaman regulasi. Generasi muda yang kreatif dan terbuka terhadap teknologi memiliki peluang besar di pasar internasional, namun memerlukan peningkatan produk, pemasaran, dan akses jaringan. Dukungan pemerintah dalam pelatihan, infrastruktur, dan konsultasi, serta pembentukan roadmap ekspor, dapat memperkuat daya saing UMKM Indonesia di pasar global.



4. PERTANIAN CERDAS UNTUK MASA DEPAN GENERASI MUDA

Hasil Sensus Pertanian 2023 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan tantangan besar yang dihadapi sektor pertanian di Indonesia. Data sensus mengungkapkan bahwa mayoritas petani merupakan generasi yang lebih tua, yang menandakan bahwa profesi ini minim regenerasi. Dari sekitar 29 juta petani terdaftar, sekitar 70 persen berasal dari generasi X (usia 43–58 tahun) dan baby boomer (usia 59–77 tahun). Secara rinci, generasi X menyumbang 42,39 persen dan baby boomer 27,61 persen dari total petani. Sementara itu, petani muda dari kelompok Gen Z (usia 11–26 tahun) hanya mencakup 2,14 persen, atau sekitar 627 ribu orang—angka yang lebih rendah dibandingkan dengan pre-boomer (berusia di atas 78 tahun) yang mencapai 2,24 persen.



IMPLIKASI MINIMNYA REGENERASI PETANI

Fenomena minimnya regenerasi petani ini memunculkan kekhawatiran mendalam mengenai keberlanjutan sektor pertanian di Indonesia. Kurangnya perhatian pemerintah terhadap inovasi yang dapat dibawa oleh pemuda, terutama dalam bidang pertanian, menjadi salah satu faktor penyebab. Selain itu, minimnya infrastruktur pertanian di daerah juga menghambat generasi muda untuk terjun ke dunia pertanian. Berbagai tantangan, seperti perubahan iklim, fluktuasi harga, dan ketidakpastian pasar, semakin membuat petani muda enggan untuk terlibat. Kesiapan sumber daya manusia (SDM) untuk mengimplementasikan transformasi digital dalam pertanian juga masih jauh dari harapan, sehingga mengakibatkan ketidakakuratan dalam rekapitulasi data pertanian.

Di sisi lain, kurangnya informasi tentang metode pengembangan pertanian dan kontrol harga pangan menambah kompleksitas permasalahan yang dihadapi. Padahal, keberadaan inovasi dan teknologi dalam pertanian cerdas sangat diperlukan untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing petani. Pemerintah diharapkan dapat mengembangkan inovasi yang tidak hanya ramah lingkungan tetapi juga berkelanjutan.

KOLABORASI UNTUK INOVASI PERTANIAN

Membangun inovasi dalam sektor pertanian memerlukan kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan universitas. Kerja sama ini sangat penting untuk menciptakan sinergi dalam mendukung perkembangan inovasi di bidang pertanian. Pemerintah, sebagai pemangku kebijakan, perlu menjalin kemitraan dengan sektor swasta yang memiliki kapasitas untuk mengembangkan teknologi pertanian. Melalui kolaborasi ini, solusi inovatif diharapkan dapat membantu petani mengatasi berbagai tantangan yang mereka hadapi.

Kolaborasi antara pemerintah dan swasta juga penting dalam mengembangkan sistem kontrol harga pangan. Dengan adanya sistem yang baik untuk memantau dan mengendalikan harga, petani akan lebih terjamin dalam pemasaran produk mereka. Ketika harga pangan stabil, petani akan lebih terdorong untuk meningkatkan produksi dan kualitas hasil pertanian, yang berdampak positif bagi ketahanan pangan nasional.



DUKUNGAN UNTUK GENERASI MUDA

Kehadiran pemerintah dalam mendukung generasi muda untuk berinovasi di bidang pertanian menjadi sangat krusial. Diharapkan, pemerintah dapat menyediakan wadah bagi generasi muda untuk berpartisipasi dalam menerapkan pertanian cerdas dengan menggunakan konsep pertanian presisi. Selain itu, anak muda perlu dilibatkan dalam rekapitulasi data pertanian dan terhubung dengan program Satu Data Indonesia yang sedang dibangun. Program ini bertujuan menyediakan data akurat dan terintegrasi, memudahkan pengambilan keputusan dalam kebijakan pertanian.

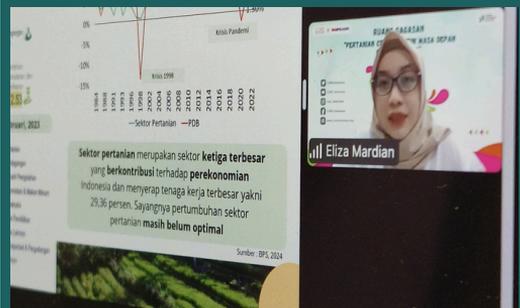
Dengan memanfaatkan teknologi, generasi muda dapat berkontribusi dalam mengumpulkan dan menganalisis data pertanian. Mereka juga dapat memanfaatkan platform digital untuk memperkenalkan produk pertanian dan menjalin hubungan dengan pasar internasional. Dukungan dari pemerintah dalam hal pendidikan dan pelatihan juga perlu diperkuat agar generasi muda memiliki keterampilan yang diperlukan untuk berinovasi di sektor pertanian.

REKOMENDASI

- **Peningkatan Infrastruktur Pertanian:** Pemerintah perlu meningkatkan infrastruktur pertanian di daerah untuk menarik generasi muda dan mempercepat adopsi teknologi.
- **Program Pelatihan dan Edukasi:** Memperkuat program pelatihan bagi petani muda tentang teknik budidaya efisien dan ramah lingkungan untuk meningkatkan produktivitas.
- **Kolaborasi Multi-Pihak:** Mendorong kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan institusi pendidikan untuk menciptakan inovasi teknologi yang berkelanjutan dalam pertanian.
- **Membangun Linkage dengan Koperasi atau Kelompok Tani :** Adanya kepastian pasar dan harga komoditas pertanian akan mendorong anak muda semangat menjadi petani. Mereka tidak akan dihadapkan dengan fluktuasi harga yang penuh ketidakpastian.
- **Dukungan Teknologi dan Digitalisasi:** Mendorong pemanfaatan teknologi digital dalam pengumpulan data dan pemasaran produk pertanian untuk meningkatkan daya saing.

KESIMPULAN

Tantangan demografi yang dihadapi oleh sektor pertanian Indonesia memerlukan perhatian serius dari pemerintah dan masyarakat. Minimnya regenerasi petani dan minimnya keterlibatan generasi muda dalam bidang pertanian menjadi indikator bahwa sektor ini perlu inovasi dan revitalisasi. Dengan kolaborasi yang baik antara berbagai pihak dan dukungan yang tepat, sektor pertanian di Indonesia dapat bertransformasi menjadi lebih berkelanjutan dan mampu menjawab tantangan masa depan. Upaya ini tidak hanya akan memastikan keberlanjutan sektor pertanian tetapi juga mendukung ketahanan pangan nasional.



5. TANTANGAN PENGANGGURAN MUDA

Indonesia saat ini berada dalam fase bonus demografi, di mana jumlah penduduk usia produktif (15–64 tahun) lebih besar dibandingkan dengan jumlah penduduk usia non-produktif. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2023, sekitar 69,13% dari total penduduk Indonesia berada dalam kelompok usia produktif. Bonus demografi ini memberikan peluang besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi jika dimanfaatkan dengan baik. Namun, tantangan besar yang dihadapi adalah tingginya tingkat pengangguran di kalangan pemuda.

Menurut data BPS pada Agustus 2023, tingkat pengangguran terbuka di kalangan pemuda berusia 15–24 tahun mencapai 19,4%, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat pengangguran nasional yang berada di angka 5,3%. Beberapa faktor yang menyebabkan tingginya pengangguran di kalangan pemuda antara lain kurangnya keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja, minimnya pengalaman kerja, dan terbatasnya kesempatan kerja yang tersedia.

Selain itu, program-program yang ada, seperti program Pra Kerja, belum mampu memberikan solusi yang signifikan terhadap masalah pengangguran di kalangan anak muda.

Jika melihat lebih dalam, sekitar 20,27 persen atau 9 juta anak muda Indonesia berusia 15–24 tahun tidak memiliki aktivitas produktif seperti tidak bersekolah, bekerja, atau mengikuti pelatihan (NEET) pada tahun 2023.

MAGANG UNTUK PENGUATAN DAYA SAING PEKERJA MUDA

Program magang menjadi solusi strategis untuk memitigasi tingginya angka pengangguran generasi muda di Indonesia dalam konteks bonus demografi, dimana sistem pelatihan berbasis tempat kerja (On-Job Training) ini memfasilitasi peserta untuk memperoleh eksposur langsung terhadap kompetensi dan pengalaman profesional di lingkungan kerja nyata.

Program magang memberikan banyak manfaat baik bagi peserta magang maupun perusahaan, diantaranya memberikan kesempatan untuk memperoleh pengalaman kerja yang nyata. Mereka dapat belajar secara langsung dari para profesional berpengalaman dan memahami dinamika pekerjaan sehari-hari. Pengalaman ini sangat penting untuk meningkatkan daya saing anak muda.

Selain mempersiapkan anak muda untuk menjadi pekerja yang kompeten, magang juga dapat menjadi inkubator bagi calon pebisnis muda. Dalam lingkungan kerja yang dinamis, peserta magang dapat belajar tentang manajemen bisnis, inovasi, dan strategi pemasaran. Pengetahuan ini sangat berharga bagi mereka yang bercita-cita menjadi pebisnis.

Menghadapi tantangan pengangguran muda di tengah bonus demografi, pelatihan kerja melalui magang menawarkan solusi yang praktis dan efektif. Magang tidak hanya membantu mengurangi pengangguran di kalangan pemuda dengan memberikan mereka keterampilan yang relevan dan pengalaman kerja, tetapi juga membuka jalan bagi mereka yang bercita-cita menjadi pebisnis muda.

Dengan mendukung program magang yang komprehensif dan terstruktur, Indonesia dapat memanfaatkan potensi bonus demografi secara maksimal dan menciptakan generasi muda yang siap bersaing di pasar global, baik sebagai tenaga kerja profesional maupun sebagai pengusaha yang inovatif

REKOMENDASI

- **Perluasan Program Magang Terstruktur:** Tingkatkan kerja sama antara pemerintah dan industri untuk menyediakan magang yang relevan dan berbasis keterampilan kerja.
- **Peningkatan Akses Magang:** Pastikan pemuda di berbagai daerah memiliki akses mudah ke program magang melalui subsidi dan platform digital.
- **Pelatihan Kewirausahaan:** Integrasikan pelatihan kewirausahaan dalam program magang untuk mendorong generasi muda menjadi pebisnis inovatif.



KESIMPULAN

Program magang memegang peran krusial dalam mengatasi tingginya angka pengangguran di kalangan pemuda Indonesia, terutama di tengah momentum bonus demografi. Dengan memberikan pengalaman kerja nyata dan keterampilan yang relevan, magang meningkatkan daya saing anak muda dan mempersiapkan mereka untuk masuk ke dunia kerja profesional atau bahkan menjadi wirausahawan. Solusi ini mampu menjawab kebutuhan keterampilan praktis dan eksposur lapangan yang seringkali menjadi kekurangan para pencari kerja muda. Melalui dukungan terhadap program magang yang terstruktur, Indonesia memiliki peluang besar untuk memaksimalkan potensi demografi dan membentuk generasi muda yang kompetitif di tingkat global.



6. MODAL USAHA ANTI RIBET BAGI PEBISNIS MUDA

Perkembangan teknologi finansial atau fintech di Indonesia telah mengalami kemajuan pesat dalam beberapa tahun terakhir. Salah satu inovasi fintech yang mendapat perhatian besar adalah peer-to-peer (P2P) lending. Menurut data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hingga tahun 2023, jumlah penyelenggara P2P lending yang terdaftar dan berizin mencapai lebih dari 150 perusahaan. Total penyaluran pinjaman melalui platform ini telah mencapai lebih dari Rp 200 triliun, menunjukkan bahwa P2P lending semakin menjadi alternatif yang signifikan dalam pembiayaan, terutama bagi pengusaha muda yang sering kesulitan mengakses modal dari lembaga keuangan konvensional.

Pengusaha muda di Indonesia kerap menghadapi tantangan besar dalam memperoleh pendanaan untuk memulai dan mengembangkan bisnis mereka. Menurut survei yang dilakukan oleh Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) pada tahun 2022, lebih dari 60% pengusaha muda menyatakan bahwa kesulitan terbesar mereka adalah akses ke modal. Lembaga keuangan tradisional seperti bank biasanya memerlukan jaminan dan riwayat kredit yang kuat, yang seringkali tidak dimiliki oleh pengusaha muda. P2P lending hadir sebagai solusi alternatif dengan proses yang lebih mudah dan cepat, serta persyaratan yang lebih fleksibel.

Namun, seiring dengan pertumbuhan P2P lending, muncul juga berbagai tantangan yang perlu dihadapi. Salah satunya adalah masalah regulasi. Regulasi yang ketat diperlukan untuk melindungi konsumen dan memastikan kestabilan sistem keuangan. Namun, regulasi yang berlebihan dapat menghambat inovasi dan pertumbuhan industri fintech. Menyeimbangkan antara kebutuhan untuk mendorong inovasi dan perlindungan konsumen menjadi tantangan utama bagi regulator dan pelaku industri. OJK telah menerbitkan beberapa peraturan untuk mengatur industri P2P lending, tetapi masih diperlukan penyesuaian dan peningkatan kebijakan untuk mendukung pertumbuhan yang sehat.

Kepercayaan konsumen terhadap platform P2P lending juga menjadi isu krusial. Kasus-kasus penipuan dan gagal bayar yang terjadi di beberapa platform P2P lending telah menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat. Berdasarkan laporan dari AFPI pada tahun 2023, tercatat ada peningkatan pengaduan konsumen terkait penipuan dan masalah pembayaran. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun P2P lending menawarkan peluang besar, masih ada risiko yang perlu dikelola dengan baik untuk menjaga kepercayaan publik.

Peningkatan literasi keuangan dan edukasi mengenai P2P lending menjadi langkah penting untuk meningkatkan kepercayaan konsumen. Pemerintah dan pelaku industri perlu bekerja sama dalam mengedukasi masyarakat tentang manfaat dan risiko P2P lending. Selain itu, penerapan teknologi seperti blockchain dan kecerdasan buatan (AI) dapat digunakan untuk meningkatkan transparansi dan keamanan dalam transaksi P2P lending. Inovasi teknologi ini diharapkan dapat mengurangi risiko penipuan dan meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap platform P2P lending.

PENINGKATAN LITERASI KEUANGAN

Salah satu solusi yang diusulkan OJK untuk mengatasi tantangan dalam sektor ini adalah melalui peningkatan literasi keuangan. OJK merencanakan pelaksanaan pendidikan keuangan secara masif, yang mencakup berbagai aspek seperti edukasi keuangan tematik dan pengembangan infrastruktur edukasi keuangan. Melalui kampanye literasi keuangan nasional, OJK berharap masyarakat, terutama pelaku UMKM, dapat memahami pentingnya pengelolaan keuangan yang baik dan manfaat dari akses terhadap layanan P2P lending.

Salah satu solusi yang diusulkan OJK untuk mengatasi tantangan dalam sektor ini adalah melalui peningkatan literasi keuangan. OJK merencanakan pelaksanaan pendidikan keuangan secara masif, yang mencakup berbagai aspek seperti edukasi keuangan tematik dan pengembangan infrastruktur edukasi keuangan.



Melalui kampanye literasi keuangan nasional, OJK berharap masyarakat, terutama pelaku UMKM, dapat memahami pentingnya pengelolaan keuangan yang baik dan manfaat dari akses terhadap layanan P2P lending.



REKOMENDASI

- **Kebijakan Pendukung Pembiayaan :** Pemerintah perlu merumuskan kebijakan yang dapat memperkuat akses UMKM terhadap pembiayaan, terutama dari sektor formal.
- **Dukungan untuk Fintech:** Memberikan dukungan kepada industri fintech dalam menyediakan produk yang tepat bagi UMKM, dengan memperhatikan aspek keamanan dan transparansi.
- **Program Edukasi Keuangan:** Melaksanakan program pendidikan keuangan untuk meningkatkan pemahaman UMKM tentang akses pembiayaan dan pengelolaan keuangan.
- **Pemberantasan Pinjaman Online Ilegal:** Mengintensifkan upaya pemberantasan pinjaman online ilegal untuk melindungi konsumen dan menjaga stabilitas industri.

KESIMPULAN

Meskipun UMKM memiliki peran yang sangat vital dalam perekonomian Indonesia, tantangan pembiayaan yang signifikan harus segera diatasi. Upaya untuk mengembangkan industri fintech, meningkatkan literasi keuangan, dan memberantas pinjaman online ilegal menjadi langkah-langkah penting untuk memastikan keberlanjutan dan pertumbuhan sektor UMKM. Dengan kebijakan yang tepat dan dukungan yang komprehensif, diharapkan UMKM dapat terus berkembang, menciptakan lapangan kerja, dan berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian nasional.



7. POSISI KAUM MUDA SETELAH 79 TAHUN INDONESIA MERDEKA

Saat ini lebih dari 53% penduduk Indonesia adalah generasi milenial dan Gen Z. Indonesia berada di ambang bonus demografi yang akan mencapai puncaknya dalam 11 tahun ke depan. Namun, tantangan yang dihadapi generasi ini sangat besar, terutama saat memasuki era penuaan ketika jumlah penduduk non-produktif akan melebihi penduduk produktif. Sementara itu, situasi pencarian kerja saat ini sudah cukup sulit, dan tanpa langkah proaktif, beban di masa depan akan semakin berat.

Kondisi ekonomi Indonesia saat ini menunjukkan bahwa kita tidak hanya menghadapi pertumbuhan yang stagnan tetapi juga tantangan serius dari premature deindustrialisasi. Dalam dua dekade terakhir, rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia menurun dari 6,4% (1980-2000) menjadi 5% dalam sepuluh tahun terakhir. Sektor manufaktur yang pada tahun lalu masih berkontribusi 32% terhadap PDB, kini turun menjadi hanya 18,5%. Hal ini memperlihatkan bahwa kapasitas untuk menciptakan lapangan kerja semakin mengecil, dan situasi ini sangat memprihatinkan,

terutama bagi masyarakat yang 56%-nya adalah lulusan SMP ke bawah.

Sementara itu, angka NEET (Not in Education, Employment, or Training) di Indonesia mencapai 20,6%, jauh lebih tinggi dibandingkan negara-negara tetangga seperti Malaysia (10%) dan Filipina (12%). Dampak dari semua ini adalah bahwa generasi muda yang tidak mampu mandiri diharapkan harus menghidupi orang tua mereka di masa depan.



REKOMENDASI

- **Meningkatkan Keterampilan dan Pendidikan:** Anak muda harus berinvestasi dalam keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar. Pelatihan dan pendidikan yang memadai akan membuka peluang kerja yang lebih baik.
- **Berpartisipasi dalam Kebijakan Publik:** Generasi muda perlu lebih aktif dalam menyuarakan pendapat mengenai kebijakan ekonomi dan sosial, serta mendorong pemerintah untuk menjalankan amanat konstitusi, terutama yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam dan penciptaan lapangan kerja.
- **Membangun Jejaring dan Kolaborasi:** Kolaborasi dengan berbagai pihak, baik pemerintah maupun swasta, akan memperkuat gerakan perubahan. Anak muda perlu membangun jejaring untuk berbagi ide dan sumber daya.
- **Mengambil Inisiatif dalam Perubahan Sosial:** Mengambil sikap aktif dan berkontribusi dalam masyarakat adalah bentuk cinta tanah air. Anak muda harus berani melibatkan diri dalam kegiatan sosial dan politik untuk menciptakan perubahan yang berarti.

KESIMPULAN

Masa depan ekonomi Indonesia sangat bergantung pada langkah yang diambil oleh generasi muda hari ini. Dengan tantangan yang ada, seperti deindustrialisasi dan tingginya angka NEET, sudah saatnya anak muda menyadari peran penting mereka dalam menciptakan perubahan. Kesadaran akan tanggung jawab kolektif, peningkatan pendidikan dan keterampilan, serta tindakan nyata dalam memperjuangkan keadilan ekonomi adalah langkah-langkah kunci untuk meraih cita-cita Indonesia Emas 2045. Dengan keberanian dan semangat kolaborasi, generasi muda dapat mewujudkan kesejahteraan yang seharusnya menjadi hak setiap warga negara.





8. ANAK MUDA PEDULI SAMPAH

Pengelolaan sampah di Indonesia menghadapi tantangan serius seiring dengan meningkatnya populasi dan konsumsi yang mendorong produksi sampah yang semakin besar. Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mencatat bahwa pada tahun 2023, Indonesia menghasilkan lebih dari 38 juta ton sampah per tahun. Sebagian besar sampah ini tidak dikelola dengan baik dan berakhir di Tempat Pembuangan Akhir (TPA), yang memicu pencemaran lingkungan, peningkatan emisi gas rumah kaca, serta krisis perubahan iklim.

Namun, dibalik masalah tersebut, terdapat peluang besar untuk menciptakan model bisnis yang berkelanjutan dan menguntungkan melalui pengelolaan sampah. Berbagai kebijakan, seperti Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017, mendorong sektor swasta dan masyarakat untuk berperan aktif dalam pengurangan, pengelolaan, dan daur ulang sampah.

Dalam konteks ini, generasi muda Indonesia memainkan peran krusial sebagai agen perubahan dalam pengelolaan sampah. Melalui kreativitas dan kepekaan terhadap isu lingkungan, banyak anak muda telah menginisiasi startup dan gerakan sosial yang berfokus pada pengelolaan sampah berkelanjutan. Mereka tidak hanya menciptakan solusi inovatif seperti aplikasi bank sampah digital dan sistem daur ulang berbasis teknologi, tetapi juga aktif mengedukasi masyarakat melalui platform media sosial tentang pentingnya pemilahan sampah dan ekonomi sirkular. Semangat kewirausahaan sosial yang dimiliki generasi muda ini menjadi katalis penting dalam mentransformasi tantangan sampah menjadi peluang ekonomi yang bermanfaat bagi lingkungan dan masyarakat.

STUDI KASUS BANYUMAS: PENGELOLAAN SAMPAH TERINTEGRASI

Salah satu contoh sukses dalam pengelolaan sampah di Indonesia adalah Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, yang telah menjadi model bagi beberapa kota di ASEAN. Banyumas meluncurkan program "Banyumas Zero Waste" pada tahun 2018 dengan pendekatan holistik yang menggabungkan teknologi, kolaborasi dengan sektor swasta, dan partisipasi masyarakat. Program ini berhasil mengurangi volume sampah yang masuk ke TPA sebesar 40% dalam lima tahun pertama.

Inovasi yang diusung oleh Banyumas yakni proses pengelolaan sampah dengan penggunaan teknologi.

Sampah organik akan diproses hingga menjadi maggot, yang grade A dapat diekspor ke Korea dan Taiwan sebagai bahan kosmetik. Selanjutnya pengelolaan sampah anorganik sebagai bahan untuk menghasilkan paving blok dan co-firing sebagai bahan campuran batubara pada PLTU.

Sampah organik akan diproses hingga menjadi maggot, yang grade A dapat diekspor ke Korea dan Taiwan sebagai bahan kosmetik. Selanjutnya pengelolaan sampah anorganik sebagai bahan untuk menghasilkan paving blok dan co-firing sebagai bahan campuran batubara pada PLTU.

REKOMENDASI

- **Peningkatan Teknologi Pengelolaan Sampah:** Daerah-daerah lain di Indonesia perlu mengadopsi teknologi pengelolaan sampah yang inovatif, seperti yang dilakukan di Banyumas, untuk mengoptimalkan pengolahan sampah organik dan anorganik menjadi produk bernilai ekonomis.
- **Kolaborasi antara Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat:** Diperlukan sinergi yang kuat antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat dalam merancang serta mengimplementasikan program pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Program yang melibatkan berbagai pihak ini mampu meningkatkan partisipasi dan efektivitas pengelolaan.
- **Penguatan Kebijakan dan Regulasi:** Perlu adanya penguatan serta implementasi yang lebih ketat terhadap kebijakan pengelolaan sampah, termasuk mendorong inovasi dan investasi di sektor daur ulang dan pengolahan limbah, untuk mencapai target pengurangan sampah yang signifikan.



KESIMPULAN

Pengelolaan sampah di Indonesia menghadapi tantangan besar, namun juga menawarkan peluang ekonomi dan lingkungan yang signifikan jika dikelola dengan baik. Studi kasus Kabupaten Banyumas menunjukkan bahwa pendekatan holistik yang memadukan teknologi, kolaborasi, dan kebijakan yang mendukung dapat mengurangi volume sampah secara drastis dan membuka peluang bisnis berkelanjutan. Dengan mengikuti jejak Banyumas, daerah lain di Indonesia dapat menerapkan strategi serupa untuk menciptakan model pengelolaan sampah yang efektif, inovatif, dan berdampak positif secara ekonomi dan ekologi.



9. AKAL IMITASI MEMPERCEPAT DISRUPSI

Akal imitasi alias kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) telah menjadi fenomena yang mengubah lanskap industri di berbagai sektor, termasuk media dan konten digital.

Teknologi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi dalam pemrosesan data, tetapi juga berperan penting dalam pengambilan keputusan berbasis algoritma. Namun, seperti halnya inovasi teknologi lainnya, perkembangan AI juga menimbulkan tantangan besar, terutama bagi pekerja di industri kreatif.

Menurut laporan Global AI Index 2022 yang diterbitkan oleh Tortoise Intelligence, Indonesia menduduki peringkat ke-62 dari 62 negara yang disurvei dalam hal kesiapan, implementasi, dan inovasi AI. Meski berada di posisi terbawah, adopsi AI di Indonesia menunjukkan tren positif, terutama di kalangan pekerja dan pengusaha.

Studi yang dilakukan oleh Populix, sebuah platform wawasan konsumen, pada April 2023 memberikan gambaran yang lebih rinci. Dari 1.014 responden yang disurvei, 45% pekerja dan pengusaha Indonesia telah mengadopsi aplikasi AI dalam pekerjaan mereka, dengan ChatGPT menjadi yang paling populer diantara para pengguna AI (52%).

Ini menunjukkan bahwa, meski Indonesia tertinggal dari segi kesiapan, implementasi AI terus berkembang, terutama di industri media dan konten digital.

Dalam industri media digital Indonesia, adopsi AI semakin akseleratif, terutama di kalangan mahasiswa dan generasi muda yang aktif dalam produksi konten video. Teknologi ini memudahkan otomatisasi tugas-tugas seperti penjadwalan posting dan analisis keterlibatan audiens. Selain itu, AI juga digunakan untuk menghasilkan ide konten, mengoptimalkan judul, hingga meningkatkan kualitas video dengan teknologi pengenalan wajah dan objek.

Sejumlah teknologi AI yang populer di industri ini termasuk Text-to-Speech (TTS), presenter virtual berbasis AI, transkripsi otomatis, subtitling, hingga pengeditan video yang lebih cerdas. Teknologi tersebut tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga menciptakan peluang baru dalam pengembangan konten.

Generasi muda Indonesia, memanfaatkan kombinasi kreativitas mereka dengan teknologi AI untuk menciptakan konten yang lebih engaging dan efisien, mulai dari konten pendidikan, hiburan, hingga marketing digital. Namun, di sisi lain, mereka juga menghadapi dilema antara mengoptimalkan efisiensi AI dan mempertahankan sentuhan kreatif manusia dalam karya mereka.

Hal ini mendorong munculnya tren "hybrid content creation" di kalangan kreator muda, di mana AI diposisikan sebagai alat bantu untuk meningkatkan produktivitas, sementara originalitas dan nilai artistik tetap bersumber dari kreativitas manusia. Fenomena ini menunjukkan bahwa generasi muda Indonesia tidak hanya adaptif terhadap teknologi baru, tetapi juga kritis dalam memanfaatkannya untuk menciptakan nilai tambah dalam industri kreatif.

PELINDUNGAN PEKERJA KREATIF

Namun, perkembangan AI tidak lepas dari tantangan bagi para pekerja di industri kreatif. Menurut laporan *The Impact of AI on Creative Industries* yang diterbitkan oleh World Economic Forum pada 2023, diperkirakan 25-30% pekerjaan di industri kreatif global akan terdampak AI dalam lima tahun mendatang. Ini termasuk ancaman pengurangan pekerja manusia karena AI mampu menghasilkan konten secara cepat dan murah.

Salah satu masalah utama dalam pengembangan AI di Indonesia adalah anggaran yang terbatas. Dibandingkan dengan negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan China, anggaran Indonesia untuk pengembangan AI jauh lebih kecil. Amerika Serikat, misalnya, mengalokasikan US\$328 juta untuk AI, sementara Indonesia hanya mengalokasikan sekitar Rp 1,3 triliun.

Amerika Serikat, misalnya, Kondisi ini menyebabkan Indonesia hanya menjadi konsumen pengguna AI, tanpa menjadi pemain besar dalam inovasi teknologi AI.

Salah satu masalah utama dalam pengembangan AI di Indonesia adalah anggaran yang terbatas. Dibandingkan dengan negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan China, anggaran Indonesia untuk pengembangan AI jauh lebih kecil. Amerika Serikat, misalnya, mengalokasikan US\$328 juta untuk AI, sementara Indonesia hanya mengalokasikan sekitar Rp 1,3 triliun. Kondisi ini menyebabkan Indonesia hanya menjadi konsumen pengguna AI, tanpa menjadi pemain besar dalam inovasi teknologi AI.

Masalah lainnya adalah devaluasi karya kreatif. AI dapat dengan mudah meniru gaya atau karya yang sudah ada melalui data pelatihan yang diolah, menimbulkan masalah hak cipta dan etika. Para pekerja kreatif di Indonesia dan di seluruh dunia telah menyuarakan kebutuhan regulasi yang lebih ketat untuk melindungi hak cipta manusia dan memastikan transparansi dalam penggunaan data pelatihan AI.

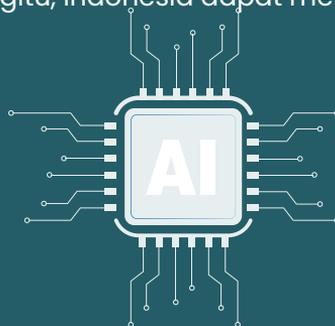


Selain itu, tantangan lain yang dihadapi Indonesia adalah infrastruktur yang belum memadai dan rendahnya jumlah sumber daya manusia (SDM) yang terampil dalam teknologi AI. Tanpa regulasi dan pengamanan (safeguard) yang kuat, perkembangan AI bisa berdampak negatif, terutama jika AI mulai beroperasi tanpa memerlukan prompt atau arahan dari manusia, yang dapat memicu masalah besar di masa depan.

Kesalahan terbesar Indonesia adalah terlalu fokus pada teknologi AI tanpa mempersiapkan SDM yang mampu menguasai penggunaan AI. Padahal, pengembangan kapasitas SDM ini sangat penting untuk menghadapi disrupsi yang ditimbulkan oleh AI. Menurut Danar Juniarto (PIKAT Demokrasi), manusia tidak akan tergantikan oleh AI jika mereka dapat menguasai teknologi tersebut.

REKOMENDASI

- **Peningkatan Kapasitas SDM:** Indonesia perlu lebih banyak berinvestasi dalam pelatihan dan pengembangan keterampilan tenaga kerja agar mampu menguasai teknologi AI. Ini akan memastikan bahwa pekerja Indonesia tidak hanya menjadi konsumen AI, tetapi juga bagian dari pengembangannya.
- **Regulasi Perlindungan Tenaga Kerja:** Pemerintah perlu merumuskan regulasi yang melindungi pekerja dari ancaman penggantian oleh AI. Regulasi ini harus mencakup perlindungan terhadap hak cipta, hak kerja, dan batasan penggunaan AI dalam industri kreatif.
- **Validasi Karya yang Dihasilkan AI:** Setiap karya yang dihasilkan oleh AI harus melalui validasi manusia untuk memastikan bahwa tidak ada kesalahan atau pelanggaran hak cipta. Ini juga membantu menjaga kualitas karya kreatif.
- **Anggaran Pengembangan AI yang Tepat Sasaran:** Anggaran untuk pengembangan AI di Indonesia harus digunakan secara efisien, tidak hanya untuk regulasi dan sosialisasi, tetapi juga untuk pengembangan teknologi yang berdampak langsung pada peningkatan ekonomi.
- **Peningkatan Literasi AI:** Pemerintah dan masyarakat harus lebih memahami potensi dan risiko AI melalui program literasi teknologi yang menyeluruh. Dengan begitu, Indonesia dapat memanfaatkan AI secara bijak dan etis.



KESIMPULAN

AI telah membuka peluang besar bagi industri kreatif, namun juga menimbulkan tantangan yang tidak bisa diabaikan. Pekerja di sektor media dan konten digital perlu lebih siap menghadapi disrupsi teknologi ini. Dengan regulasi yang tepat, peningkatan keterampilan, dan perlindungan hak cipta yang kuat, Indonesia dapat memanfaatkan AI secara optimal tanpa merugikan para pekerja kreatif.

Di sisi lain, pemerintah perlu berkomitmen lebih serius dalam mendukung pengembangan AI, terutama dengan alokasi anggaran yang lebih memadai dan fokus pada peningkatan SDM. Dengan langkah-langkah ini, Indonesia dapat bergerak lebih maju dalam persaingan global, menjadikan AI sebagai alat bantu yang memperkuat, bukan menggantikan, peran manusia dalam industri kreatif.



PENUTUP

PERSOALAN EKONOMI DI MATA GENERASI MUDA

Indonesia menghadapi berbagai tantangan strategis di sektor lingkungan, pendidikan, ekonomi, dan teknologi yang memerlukan peran aktif generasi muda. Penurunan emisi, akses pendidikan yang lebih terjangkau, pengembangan UMKM untuk pasar global, regenerasi petani muda, serta program magang adalah isu-isu kunci yang membutuhkan solusi inovatif dan dukungan pemerintah. Pengelolaan sampah dan teknologi AI juga memerlukan regulasi yang tepat untuk menciptakan manfaat ekonomi yang berkelanjutan. Dengan kebijakan kolaboratif dan inovasi berkelanjutan, Indonesia dapat memanfaatkan potensi generasi muda dan membangun ekonomi yang tangguh menuju 2045.

TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam terselenggaranya acara diskusi Ruang Gagasan, termasuk para mitra komunitas yang telah menjadi bagian penting dari acara ini. Dukungan, antusiasme, dan partisipasi aktif dari semua pihak memungkinkan lahirnya ide-ide segar yang relevan dan inspiratif untuk pembangunan masa depan Indonesia.

Harapan kami, semoga diskusi ini tidak hanya menjadi ruang untuk bertukar gagasan, tetapi juga menjadi awal dari langkah konkret dalam mewujudkan solusi bersama. Kami percaya, dengan semangat kolaborasi dan komitmen bersama, generasi muda Indonesia mampu menghadirkan perubahan yang positif dan membangun Indonesia yang lebih berkelanjutan serta berdaya saing.

SUARA-SUARA GENERASI MUDA UNTUK BANGSA

TIM PENYUSUN

CORE Indonesia

Eliza Mardian

Fitri Yana

Risky Priscilia

Suara.com

Bimo Aria Fundrika

Editor

Hadi Rahman

Lay-Out

Nando Purnama Aji

November 2024

KOMUNIKASI KOMUNITAS MUDA



KOMUNIKE KOMUNITAS MUDA

Youth Economic Summit 2024

Setelah 79 tahun merdeka dan dua dekade era reformasi, Indonesia masih jauh dari cita-cita pendiri bangsa. Perekonomian kita tidak baik-baik saja. Pertumbuhan ekonomi terbilang medioker dan timpang, kesejahteraan rakyat rendah dan senjang, sumber daya manusia kurang berkualitas, serta pembangunan yang merusak lingkungan dan meminggirkan warga. Untuk itu, kami ingin menyuarakan hak-hak masyarakat, terutama kaum muda, dalam pembangunan ekonomi. Pada kesempatan **Youth Economic Summit 2024** ini kami menyampaikan **Komunike Komunitas Muda**.

1. Kami berkomitmen untuk melakukan **aksi nyata mengurangi emisi karbon** dengan mengadopsi gaya hidup yang mendukung pelestarian lingkungan dan menggerakkan masyarakat untuk berperan aktif menjaga Bumi. Namun, kami berharap pemerintah mengambil kebijakan dan strategi yang memungkinkan sebanyak mungkin pihak dapat terlibat aktif dalam green economy dan praktik ramah lingkungan di segala sektor.

2. Kami menyadari bahwa **pendidikan adalah jalan terbaik untuk meningkatkan mutu bangsa**. Karena itu, kami mengusulkan kepada pemerintah agar memperluas skema subsidi pendidikan tinggi bagi kelompok bawah dan mengembangkan sistem pembiayaan yang lebih fleksibel bagi kelas menengah.

3. Kami **pelaku bisnis muda siap menjadikan produk lokal berdaya saing global**. Namun, untuk itu kami memerlukan regulasi yang lebih sederhana, akses pendanaan yang luas, biaya logistik yang murah, dan dukungan perwakilan pemerintah di luar negeri.

4. Kami bersedia menjadi **petani muda untuk mengamankan ketahanan pangan nasional** sekaligus menjadikan produk pertanian dan turunannya lebih kompetitif. Asalkan pemerintah memperbaiki ekosistem pertanian melalui modernisasi, rantai pasok yang terintegrasi, kemitraan yang menjamin kepastian pasar dan harga, serta insentif bagi anak muda yang bertani.

5. Kami merisaukan **anak muda kesulitan mendapatkan pekerjaan sehingga menyumbang angka tertinggi pengangguran**. Pemerintah perlu memperluas program magang terstruktur yang melibatkan industri dan memperbanyak pelatihan kewirausahaan bagi generasi muda agar lebih produktif, kreatif, dan inovatif. Kami mengingatkan agar bonus demografi jangan menjadi bencana demografi.

6. Kami meyakini bahwa kelompok muda berpotensi menjadi penggerak ekonomi menuju kemandirian dan kesejahteraan bersama. Tetapi, potensi itu harus dioptimalkan dengan penciptaan iklim yang sehat bagi **tumbuhnya pengusaha muda yang memiliki kecerdasan finansial**.

7. Kami anak muda peduli sampah. Sebagian kami telah berkolaborasi mengelola dan mengolah sampah menjadi barang berharga melalui praktik ekonomi sirkular. Hanya, kami perlu sinergi dengan berbagai pihak untuk mengembangkan kewirusahaan sosial disertai model bisnis yang berkelanjutan.

8. Kami muda-mudi memanfaatkan teknologi informasi termasuk akal imitasi sebagai adaptasi terhadap lanskap baru ekonomi. Namun, kami butuh intervensi pemerintah untuk melindungi pekerja kreatif digital, memperkuat keamanan siber, memperbaiki peradaban warganet, dan menyehatkan iklim ekonomi digital yang inklusif.

9. Kami generasi muda adalah bagian terbesar penduduk Indonesia. Kami tidak mau menjadi generasi sandwich. Pemerintah harus **memperbaiki struktur ekonomi supaya kelompok usia produktif menjadi kekuatan untuk menumbuhkan ekonomi** yang tinggi, inklusif, dan berkelanjutan.

10. Kami rakyat muda menuntut reformasi kebijakan ekonomi karena hingga kini birokrasi masih ruwet dan korupsi makin merajalela. Kami mendukung terciptanya mesin alternatif pertumbuhan ekonomi yang dapat meningkatkan produktivitas bangsa sekaligus mengikis budaya rente. Kami ingin seluruh elemen bangsa Indonesia hidup layak dan sejahtera.

Kami berharap suara-suara komunitas muda dalam Komunique Komunitas Muda ini mendapatkan dukungan dari semakin banyak pihak. Mari berkolaborasi untuk perbaikan ekonomi Indonesia!

Cikini, 23 November 2024





SUARA-SUARA GENERASI MUDA UNTUK BANGSA

KOMUNIKASI KOMUNITAS MUDA TENTANG EKONOMI INDONESIA

CORE Indonesia dan **Suara.com** berkomitmen memfasilitasi anak muda untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Kami menyelenggarakan berbagai kegiatan seperti diskusi tematik, bincang ekonomi daerah, pelatihan UKM muda, pembekalan birokrat muda, kuliah umum di kampus, kunjungan lapangan bisnis, dan sebagainya. Komunitas Komunitas Muda ini adalah salah satu hasil dari diskusi reguler dalam wadah **Ruang Gagasan**. Kami membuka kesempatan bagi muda-mudi untuk turut bergabung dalam komunitas ini untuk berkolaborasi dan berinovasi. Kami juga mengundang mitra-mitra yang tertarik untuk bergandeng tangan mengembangkan inisiasi dan praktik baik untuk masa depan generasi muda Indonesia.